

**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PROGRAM REHABILITASI
SOSIAL OLEH DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KOTA BATAM PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

Muhammad Fauzan

NPP. 32.0328

Asdaf Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau

Program Studi Pembangunan Ekonomi dan

Pemberdayaan Masyarakat

Email: 32.0328@praja.ipdn.ac.id

Pembimbing Skripsi: Dwi Indah Kartika, S.Pd, M.Si

ABSTRACT

Problem Statement (Kesenjangan Penelitian): The number of People with Social Welfare Problems in Batam City which is fluctuating and the increasing poverty rate in Batam City which still requires special attention from the Batam City Government, where the existence of People with Social Welfare Problems (PMKS) not only disrupts public order but also shows limited access to employment and minimal opportunities for skill improvement for vulnerable communities. **Purpose:** This study aims to know the Implementation of Community Empowerment through the Social Rehabilitation Program by the Batam City Social and Community Empowerment Service using the Sumodiningrat community empowerment theory approach which includes the dimensions of enabling, empowering, and protecting. **Method:** This study uses a descriptive qualitative approach method and the main instrument analysis is the researcher, equipped with data collection techniques through interviews with (9) informants, observation, documentation, and data triangulation. Data analysis uses Miles and Huberman through data reduction, data presentation, and drawing conclusions. **Result:** The findings obtained by the author in this study indicate that in the enabling dimension the program has succeeded in creating a conducive climate, while in empowering the program it was found that it provided strengthening of the capacity of beneficiaries through skills training and self-confidence guidance. However, in the protecting dimension, there is a weakness in ensuring economic sustainability after rehabilitation, where the lack of monitoring and evaluation mechanisms has led to limited protection so that beneficiaries are truly economically independent. The main inhibiting factors are limited competence and quantity of human resources and limited budget allocation, while government support with CSR collaboration is a significant supporting factor. **Conclusion:** The Social Rehabilitation Program by the Social Service and Community Empowerment of Batam City has been running quite well in empowering Social Welfare Problem Sufferers who are included in the beneficiaries, but it is necessary to strengthen the post-rehabilitation mechanism including increasing human resource capacity, sustainable fund allocation, and an integrated monitoring system so that the economic independence of beneficiaries can be realized sustainably.

Keywords: Community Empowerment; Social Rehabilitation; PMKS

ABSTRAK

Permasalahan (Kesenjangan Penelitian): Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kota Batam yang mengalami fluktuasi dan naiknya angka kemiskinan di Kota Batam yang masih memerlukan perhatian khusus bagi Pemerintah Kota Batam, yang mana keberadaan para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) tidak hanya mengganggu ketertiban umum melainkan juga menunjukkan keterbatasan akses lapangan pekerjaan dan minimnya kesempatan peningkatan keterampilan bagi masyarakat rentan. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk menelaah pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui Program Rehabilitasi Sosial oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam dengan menggunakan pendekatan teori pemberdayaan masyarakat Sumodiningrat yang meliputi dimensi *enabling*, *empowering*, dan *Protecting*. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif dan analisis instrumen utama adalah peneliti, dilengkapi dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara terhadap (9) informan, observasi, dokumentasi, dan triangulasi data. Analisis data menggunakan Miles dan Huberman melalui reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. **Hasil/Temuan:** Temuan yang diperoleh penulis dalam penelitian ini yaitu menunjukkan bahwa dalam dimensi *enabling* program berhasil menciptakan iklim yang kondusif, seangkan *empowering* diotemukan program tersebut memberikan penguatan kapasitas penerima manfaat melalui pelatihan keterampilan dan bimbingan kepercayaan diri. Namun pada dimensi *protecting* terlihat kelemahan dalam jaminan keberlanjutan ekonomi pasca rehabilitasi yang mana kurangnya mekanisme monitoring dan evaluasi sehingga menyebabkan keterbatasan perlindungan agar penerima manfaat benar-benar mandiri secara ekonomi. Faktor penghambat utama adalah keterbatasan kompetensi dan kuantitas sumber daya manusia serta alokasi anggaran yang terbatas, sementara dukungan pemerintah dengan kolaborasi CSR menjadi faktor pendukung yang signifikan. **Kesimpulan:** Program Rehabilitasi Sosial oleh Dinas Sosial dan pemberdayaan Masyarakat Kota Batam sudah berjalan dengan cukup baik dalam memberdayakan para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang termasuk dalam penerima manfaat, namun perlu dilakukan penguatan mekanisme pasca rehabilitasi termasuk untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, alokasi dana berkelanjutan, dan sistem monitoring yang terintegrasi agar kemandirian ekonomi penerima manfaat dapat terwujud secara berkelanjutan.

Kata kunci: Pemberdayaan Masyarakat; Rehabilitasi Sosial; PMKS

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kesejahteraan sosial terhadap masyarakat dalam suatu negara menjadi fokus utama bagi negara tersebut agar dapat disebut sebagai negara berhasil apabila negara tersebut memiliki tingkat kesejahteraan yang baik terhadap masyarakatnya. Kesejahteraan masyarakat juga merupakan salah satu tujuan dari *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang menjadi tolak ukur dari keberhasilan pemerintah dalam membangun perekonomian suatu negara (Rahayu, 2023). Indikator dalam kesejahteraan masyarakat sangat luas dan kompleks sehingga hanya dapat diukur satu aspek kesejahteraan rakyat melalui indikator yang diukur dari berbagai aspek pembangunan (Ningrum et al., 2024). Pembangunan yang dilakukan tentunya harus seimbang yakni antara fisik dan non fisik. Menurut Suaib (2023:3) pembangunan adalah suatu konsep yang sarat dengan nilai (*Value loaded*) artinya pembangunan terkait dengan apa yang di ang gap baik dan buruk menurut pengalaman sejarah suatu bangsa.

Pada umumnya kurangnya tingkat kesejahteraan diakibatkan oleh kemiskinan yakni ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup karena terbatasnya sumber daya yang dimiliki. Kemiskinan juga merupakan suatu persoalan masalah multidimensi yang tidak hanya terjadi karena faktor ekonomis saja melainkan terkait dengan kerentanan dan kerawanan seseorang atau kelompok masyarakat untuk menjadi miskin (Saputra, 2018). Pembangunan dalam bidang kesejahteraan sosial juga turut mendorong peningkatan terhadap kualitas kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya. Perkembangan masalah kesejahteraan sosial yang ada di perkotaan cenderung meningkat, munculnya berbagai macam fenomena sosial tidak hanya bersumber dari dalam masyarakat, tetapi juga disebabkan oleh pengaruh globalisasi, industrialisasi, dan arus informasi yang cukup cepat (Mega Prastiwi & Ulfatun Najicha, 2022). Dalam hal ini pemerintah Indonesia telah menetapkan aturan untuk menyelenggarakan kesejahteraan sosial bagi masyarakatnya yang tertuang dalam Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial yang dilakukan pemerintah sebagai upaya dalam pelayanan sosial. Tingginya tingkat kemiskinan di Indonesia menyebabkan semakin banyaknya orang yang memilih hidup mencari nafkah menjadi gelandangan dan pengemis demi memenuhi kebutuhan ekonomi (Muhajir, 2023).

Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau merupakan wilayah di Indonesia yang memiliki potensi besar untuk menunjang kenaikan taraf perekonomian masyarakatnya karena Kota Batam terletak sangat strategis berdekatan dengan negara – negara luar dan merupakan kawasan jalur perdagangan bebas. Menurut data Badan Pusat Statistika Kota Batam tahun 2023, pertumbuhan ekonomi di Kota Batam tercatat sebesar 7,04% dan lebih besar dari Kepulauan Riau yang hanya 5,20%. Kota Batam mulai mengalami ledakan jumlah penduduk sejak ditetapkannya Batam sebagai suatu kawasan industri berdasarkan Kepres No 41 Tahun 1973 tentang Daerah Industri Pulau Batam (Samad & Tantimin, 2022). Banyaknya lapangan pekerjaan yang terbuka menjadi salah satu magnet bagi para pencari kerja di seluruh Indonesia untuk datang dan mengadu nasib di Kota Batam (Samad & Tantimin, 2022). Ketertarikan yang terjadi karena perkembangan pembangunan infrastruktur serta keadaan sosial ekonomi di kota yang cukup pesat menjadi faktor pendorong berpindahnya masyarakat desa ke kota (Sumantri et al., 2018). Jumlah penduduk Kota Batam saat ini pada tahun 2024 berjumlah 1.276.933 jiwa berdasarkan data BPS Kota Batam 2024.

Data Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan bahwa pada tahun 2023 Kota Batam menempati urutan tertinggi dalam jumlah penduduk miskin dengan 83,09 ribu jiwa yang mana terjadi kenaikan dari tahun sebelumnya yakni 82,59 ribu jiwa. Banyak pendatang dari luar daerah Kota Batam yang mencoba mencari peruntungan di Kota Batam, tetapi tanpa dibekali dengan pendidikan, kecakapan serta pengalaman yang cukup untuk menghadapi persaingan. Kurangnya pendidikan, kecakapan, dan pengalaman untuk menjalani kehidupan di Kota Batam inilah yang menjadi peluang meningkatnya Gelandangan dan Pengemis di Kota Batam (Ayunda et al., 2020). Begitu banyaknya urbanisasi tanpa adanya keterampilan maupun keahlian tertentu hanya akan mengakibatkan kemiskinan serta membuat padatnya pemukiman penduduk di perkotaan (Rasyid & Dompok, 2022). Sehingga hanya akan menambah angka pengangguran yang ada di Kota Batam. Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan bahwa Kota Batam menjadi daerah yang paling banyak menyumbang angka pengangguran di Kepulauan Riau dengan total 8,14% dalam angka *Unemployment Rate (UR)*

pada tahun 2023. Hal ini tentu mempengaruhi kemiskinan yang ada di Kota Batam. Penyebab dari kemiskinan yang bisa di kontrol berasal dari kurangnya usaha yang ada dalam diri individu (Weiner et al., 2011).

Fenomena kemiskinan tersebut berkaitan dengan munculnya beragam kelompok Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), mulai dari gelandangan, pengemis, hingga penyandang disabilitas dan lansia terlantar. Orang-orang penyandang disabilitas di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah telah terpinggirkan, mengalami tingkat kesulitan yang bercabang di semua bidang kehidupan yang tidak pernah dialami oleh kelompok sosial lain (Trani et al., 2022). Stigma sosial dan diskriminasi yang terkait dengan pengemisan semakin meminggirkan para lansia tunawisma, mengisolasi mereka dari masyarakat (Srinivasan & Binu Sahayam, 2024). Berikut tabel jumlah PMKS di Kota Batam pada tahun 2021-2023:

PMKS	TAHUN		
	2021	2022	2023
Gelandangan	131 jiwa	113 jiwa	238 jiwa
Pengemis	49 jiwa	181 jiwa	190 jiwa
ODGJ	111 jiwa	67 jiwa	80 jiwa
Penyandang Disabilitas	445 jiwa	445 jiwa	380 jiwa
Lansia Terlantar	225 jiwa	360 jiwa	360 jiwa
Anak Terlantar	8 jiwa	15 jiwa	22 jiwa
Tuna Susila	150 jiwa	140 jiwa	157 jiwa

Sumber : Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam, 2024

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa jumlah PMKS secara umum di Kota Batam masih bersifat fluktuatif yakni lebih banyak naik pada tahun 2023. Kondisi tersebut mengharuskan pemerintah daerah, khususnya Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam, untuk melakukan Program Rehabilitasi Sosial sebagai salah satu layanan dan upaya dalam memberdayakan para PMKS. Pemberian pelayanan yang efektif pada program rehabilitasi sosial harus sesuai dengan alur pelayanan yang sudah ditetapkan (Putri et al., 2024). Hal ini dilakukan agar PMKS dapat kembali berfungsi secara sosial dan mampu meningkatkan kemandirian terhadap pemenuhan kebutuhan perekonomian mereka.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Berdasarkan data yang telah dipaparkan, terdapat kesenjangan dalam beberapa aspek penting yang menjadi fokus penelitian ini: Pertama, meskipun Program Rehabilitasi Sosial telah ditetapkan sebagai layanan sosial di Kota Batam, masih terbatas penelitian yang mendalami bagaimana mekanisme program tersebut berjalan, khususnya dalam memberdayakan para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang ada di Kota Batam. Kedua, terdapat peningkatan penduduk miskin di Kota Batam berjumlah 83,09 ribu pada tahun 2023 meskipun pertumbuhan ekonomi di Kota Batam sudah baik. Fenomena ini menunjukkan adanya masyarakat yang tidak mampu dalam memenuhi perekonomiannya sendiri yang disebut sebagai PMKS. Ketiga, Kota Batam sebagai wilayah strategis yang mempunyai lapangan pekerjaan lebih luas namun Kota Batam mempunyai angka pengangguran yang lebih besar diantara wilayah lainnya di Kepulauan Riau sebesar 8,14% dalam angka *unemployment rate* pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan adanya masyarakat dengan tidak memiliki keterampilan untuk bekerja yang disebut sebagai PMKS. Keempat, terdapatnya kenaikan jumlah PMKS di Kota Batam secara umum

yang menunjukkan belum berjalannya Program Rehabilitasi Sosial dalam memberdayakan dan membina para PMKS agar dapat hidup normal dan tidak lagi menjadi masyarakat yang tergolong PMKS. Penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui Program Rehabilitasi Sosial dalam meningkatkan kesejahteraan sosial di Kota Batam khususnya para PMKS.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, baik dalam konteks pemberdayaan masyarakat maupun, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, dan dalam konteks Program Rehabilitasi Sosial. Penelitian Tazkiya Rizky Wildana, Dyah Lituhayu, Endang Larasati Setianingsih (Tazkia Rizky Widiana et al., 2023) berjudul Evaluasi Program Rehabilitasi Sosial dalam Penanganan Gelandangan dan Pengemis di Provinsi Jawa Tengah, penelitian ini mempunyai fokus penelitian untuk mengidentifikasi dampak program rehabilitasi sosial dalam konteks gelandangan dan pengemis serta menganalisis faktor penyebab yang terjadi khususnya di wilayah Jawa Tengah dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil yang ditemukan penelitian ini adalah pelaksanaan program rehabilitasi sosial masih terdapat beberapa faktor penghambat yakni unsur man, unsur method, dan unsur money, dan proses kegiatan program berpusat pada hasil daripada dampak. Penelitian Sulistia Ningsih (Ningsih, 2022) yang berjudul Efektivitas Rehabilitasi Terhadap Gelandangan dan Pengemis di Balai Panti Sosial Loka Bina Karya Dinas Sosial Kota Pekanbaru, penelitian ini mempunyai fokus penelitian mengenali bagaimana rehabilitasi orang gelandangan dan pengemis berhasil di Balai Panti Sosial Loka Bina Karya Dinas Sosial Kota Pekanbaru, sesuai dengan Pasal 17 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 Tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial dengan metode penelitian berupa deskriptif kualitatif. Hasil yang ditemukan dari penelitian ini adalah proses rehabilitasi gelandangan dan pengemis di Balai Panti Sosial Loka Bina Karya Dinas Sosial Kota Pekanbaru belum mencapai tingkat keberhasilan yang optimal sejak pemenuhan kebutuhan dasar yang digariskan dalam berdasarkan tupoksi Pasal 17. Penelitian Riza Korin Alfarabbi & Kus Indarto (Korin Alfarabbi & Indarto, 2024) berjudul Implementasi Program Rehabilitasi Sosial dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda, penelitian ini mempunyai fokus dalam mengidentifikasi implementasi dan faktor penghambat pelaksanaan program rehabilitasi sosial dalam pemberdayaan penyandang disabilitas oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa proses pemberdayaan penyandang disabilitas melalui program rehabilitasi sosial belum terlaksana dengan maksimal hal tersebut karena ditemukan ketidaksesuaian dalam memberikan alat bantu dan kurangnya keterbukaan keluarga dalam pelaksanaannya. Penelitian Syifa Fauziyyahh Syam (Fauziyyah Syam, 2021) berjudul Pemberdayaan Ekonomi Melalui Penyaluran Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas Tunarungu di Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Sensorik Rungu Wicara (Balai Melati) Jakarta Timur memiliki fokus penelitian terhadap identifikasi proses pemberdayaan ekonomi melalui penyaluran tenaga kerja disabilitas tunarungu dengan rentang waktu data penyaluran tahun 2018-2020 yang dilakukan oleh Balai Melati. Hasil dari penelitian ini menghasilkan empat indikator hasil pemberdayaan dalam aspek ekonomi, yaitu kebebasan, kemampuan dalam membeli kebutuhan primer, kemampuan membeli kebutuhan sekunder dan tersier, memiliki jaminan ekonomi dalam kehidupannya. Penelitian Eltiga Angga Putra Sihombing, Dwi Yuliani, dan Windriyanti (Eltiga Angga Putra Sihombing et al., 2020) berjudul Pelaksanaan Program Rehabilitasi Sosial Bagi Gelandangan dan Pengemis di Balai Rehabilitasi Sosial Gelandangan dan Pengemis di Pulau Jawa mempunyai fokus penelitian untuk mengetahui pelaksanaan program rehabilitasi sosial bagi gelandangan dan pengemis di Balai Rehabilitasi Sosial Gelandangan dan Pengemis di Pulau Jawa.

Penelitian ini menggunakan metode analisis data sekunder. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa proses rehabilitasi sosial di Balai Rehabilitasi Sosial Gelandangan dan Pengemis di Pulau Jawa sudah dilaksanakan sebagaimana mestinya walaupun masih terdapat hambatan di dalamnya baik dari internal dan eksternal.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian yang dilakukan oleh penulis dimaksudkan untuk menganalisis pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui Program Rehabilitasi Sosial yang dilakukan oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam. Persamaan antara beberapa penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah terkait dengan pelaksanaan program rehabilitasi sosial dan fokus terhadap pemberdayaan masyarakat yang tergolong dalam Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Selain itu, metodologi penelitian yang dilakukan yakni sama dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Sedangkan perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian terdahulu lebih menyoroti program rehabilitasi sosial sedangkan penelitian ini berfokus bagaimana pelaksanaan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan melalui program tersebut. Adapun perbedaan selanjutnya adalah dari teori yang digunakan yakni pada penelitian ini penulis menggunakan teori Sumodiningrat (1999) dengan 3 dimensi yakni *enabling*, *empowering*, dan *protecting* dengan tujuan untuk menjelaskan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat secara lebih mendalam. Perbedaan yang terakhir terletak pada lokus yakni secara kontekstual menganalisis pemberdayaan masyarakat khususnya PMKS melalui Program Rehabilitasi Sosial tepat di wilayah Kota Batam.

1.5. Tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau melalui Program Rehabilitasi Sosial, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi keberhasilan program tersebut.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk mengidentifikasi dan menggambarkan proses pemberdayaan masyarakat khususnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial melalui Program Rehabilitasi Sosial oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam. Hal ini bertujuan untuk menggambarkan fenomena dan gejala-gejala permasalahan yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat melalui program rehabilitasi sosial. Nurdin & Hartati, (2023:85) mengartikan penelitian fenomenologi selalu difokuskan pada menggali, memahami, dan menafsirkan arti fenomena, peristiwa dan hubungannya dengan orang-orang biasa dalam situasi tertentu. Sugiyono (2017:207) mengartikan bahwa gejala memiliki sifat holistik yang menyeluruh dan tidak dapat dipisah-pisahkan. Simangunsong (2017:191) juga menjelaskan bahwa data yang dihasilkan dari penelitian ini bersifat deskriptif, artinya data yang dikumpulkan berupa kata-kata yang terdapat dalam transkrip.

Cresswell (2014:246) menjelaskan bahwa *qualitative descriptive* sebagai suatu jenis desain kualitatif yang menghasilkan narasi deskriptif yang memiliki banyak informasi serupa laporan dengan kata-kata yang disampaikan oleh informan.

Penulis mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dalam mengumpulkan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 9 orang informan yang terdiri dari Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam, Kepala

Bidang Rehabilitasi Sosial, Kepala Unit Pelaksana Teknis Nilam Suri, Tim Reaksi Cepat, 2 orang Tenaga Pelatih, dan 3 masyarakat yang tergolong sebagai Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial penerima manfaat program.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui Program Rehabilitasi Sosial untuk memberdayakan masyarakat khususnya yang tergolong dalam Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kota Batam, dengan menggunakan teori pemberdayaan masyarakat Sumodiningrat (1999) serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi keberhasilannya. Adapun pembahasannya dapat dilihat pada subbab berikut:

3.1. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Rehabilitasi Sosial oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam

Berkaitan dengan fenomena yang dikaji oleh penulis, yaitu tentang pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam khususnya terhadap para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kota Batam melalui program Rehabilitasi Sosial. Penulis menggunakan konsep pemberdayaan milik Gunawan Sumodiningrat (1999), yakni *enabling*, *empowering*, dan *protecting*, untuk menganalisis bagaimana pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam dalam memberdayakan para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial melalui Program Rehabilitasi Sosial, sehingga tujuan pelaksanaan program ini adalah untuk mengembalikan dan meningkatkan nilai perekonomian agar dapat memenuhi kebutuhan dasarnya yaitu kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Ketiga konsep teori yang digunakan untuk mengetahui hasil dari proses pemberdayaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. *Enabling* (Pemungkinan)

Pemungkinan yang berarti mewujudkan kondisi atau suasana yang dapat meningkatkan dan mengembangkan potensi masyarakat secara maksimal. Membentuk suatu suasana yang baik sebagai alat penunjang untuk pengembangan potensi sangatlah dibutuhkan bagi mereka yang mengalami masalah kesejahteraan sosial dan masih butuh dalam proses pertumbuhan dan perkembangan. Potensi yang dimiliki dalam diri mereka akan dapat menjadi faktor keberhasilan dimasa yang akan datang. dimensi *enabling* dianalisis dalam dua indikator yakni identifikasi kebutuhan dan akses sumber daya yang diberikan oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa sebelum pelatihan dimulai, kebutuhan ekonomi dan sosial penerima manfaat diidentifikasi dengan melalui *assessment* untuk mengetahui apa yang menjadi kebutuhan penerima manfaat dan memastikan sasaran tepat, serta disediakan akses terhadap sumber daya yakni mulai dari pembinaan, pelatihan dasar, hingga fasilitas pendukung seperti mesin jahit, las listrik, hingga tempat tidur di UPTD P2PMKS Nilam Suri sehingga kondisi layak bagi penerima manfaat tercipta dan motivasi belajar meningkat.

2. *Empowering* (Penguatan)

Empowering mempunyai arti penguatan yakni memberikan suatu kekuatan baru atau mengembangkan keterampilan yang sudah ada agar masyarakat dlam hal ini khususnya para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial mampu menyelesaikan permasalahan perekonomian mereka sendiri dan mampu bersaing ditengah kehidupan bermasyarakat sehingga dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya sendiri. Dalam penelitian ini, dilihat bagaimana Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam melalui program Rehabilitasi Sosial memberikan peningkatan atau mengembalikan keterampilan terhadap potensi yang ada dalam

diri mereka para penerima manfaat. Dimensi *empowering* dianalisis melalui dua indikator yakni pengembangan keterampilan dan peningkatan kepercayaan diri para penerima manfaat. Pengembangan keterampilan yang diberikan kepada para penerima manfaat sudah terdapat kegiatan yang bertujuan mengembangkan keterampilan dan potensi diri para penerima manfaat dengan adanya pemberian pelatihan-pelatihan dasar seperti las tralis, bengkel, salon, dan menjahit. Pemberian keterampilan disesuaikan dengan gender para penerima manfaat yakni laki-laki diberikan las tralis dan bengkel sedangkan perempuan diberikan pelatihan salon dan menjahit. Selain dengan pemberian keterampilan juga diberikan dukungan untuk meningkatkan kepercayaan diri para penerima manfaat yakni dengan memberikan pendampingan penuh kepada para penerima manfaat ketika sedang melaksanakan program dan adanya bimbingan konseling sebagai pemberi motivasi para penerima manfaat untuk memiliki keinginan dalam mengembangkan potensi dirinya.

3. *Protecting* (Perlindungan)

Protecting yang memiliki arti perlindungan yaitu dalam hal ini peran Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam melindungi tiap tiap individu dari mereka yang mengalami masalah kesejahteraan sosial atau masih tergolong lemah dibandingkan masyarakat lainnya untuk dapat mempertahankan hidupnya seperti masyarakat pada umumnya. Perlindungan sangat dibutuhkan oleh para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial agar mereka bisa terus mengembangkan potensi 90 yang dimiliki tanpa ada rasa takut terhadap penindasan sehingga bisa meningkatkan perekonomiannya. Dimensi *protecting* dianalisis melalui dua indikator yakni dukungan kebijakan dan keberlanjutan program melalui monitoring dan evaluasi. Dukungan kebijakan yang telah diberikan pemerintah terkait rehabilitasi sosial untuk kesejahteraan sosial sudah ditetapkan melalui Peraturan Walikota Batam Nomor 54 Tahun 2022 tentang Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial mengenai Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial yang menguraikan secara teknis mekanisme pendaftaran, masa tinggal, jenis intervensi seperti psikososial, keterampilan kerja, pembinaan mental, dan tindak lanjut bagi tuna sosial di UPTD P2PMKS Nilam Suri Panti Sosial. Peraturan Walikota Batam Nomor 36 Tahun 2022 juga turut menjadi dukungan kebijakan yang diberikan pemerintah, yang mengatur terkait dengan kebijakan teknis layanan rehabilitasi sosial terhadap anak terlantar dan lanjut usia terlantar, dalam peraturan tersebut mengatur agar pemberian pelayanan sesuai dengan standar pelayanan rehabilitasi sosial bagi anak terlantar dan lanjut usia di UPTD P2PMKS Nilam Suri terkait dengan prosedur pendampingan serta monitoring dan evaluasi dari hasil rehabilitasi. dengan menyiapkan tempat untuk bisa mengembangkan potensi diri mereka dan dengan adanya rencana kerja yang terarah seperti yang tertuang di dalam Renstra Dinas Sosial 2021-2026 terkait dengan pemberian pembinaan dan pelatihan – pelatihan dasar sebagai suatu kebijakan dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial untuk mendukung proses pelaksanaan pemberdayaan melalui Program Rehabilitasi Sosial. Dalam keberlanjutan program melalui monitoring dan evaluasi Dinas Sosial melakukan penjangkaran beberapa titik lampu merah untuk memastikan tidak ada lagi PMKS yang berkeliaran khususnya mantan penerima manfaat dan melakukan *home visit* untuk memonitoring langsung keadaan para penerima manfaat pasca rehabilitasi. Namun belum ada jaminan perlindungan ekonomi jangka panjang seperti akses modal usaha atau sertifikasi keterampilan pasca-program untuk memastikan pemenuhan perekonomian yang mandiri dalam meningkatkan kesejahteraan PMKS pasca rehabilitasi.

3.2. Faktor Penghambat Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Rehabilitasi Sosial

Dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat khususnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang dilaksanakan melalui Program Rehabilitasi Sosial oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam terdapat berbagai hambatan yang menjadi kendala dalam keberhasilan pelaksanaan program.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis pada saat pelaksanaan penelitian di lapangan ditemukan beberapa faktor internal dan faktor eksternal yang menghambat pelaksanaan Program Rehabilitasi Sosial dalam memberdayakan masyarakat PMKS. Berikut beberapa faktor tersebut:

1. Faktor Internal

Hambatan yang berasal dari dalam program itu sendiri yang melaksanakan yakni berdasarkan hasil wawancara penulis kepada informan memberikan keterangan bahwa dalam pelaksanaan program reahabilitasi ini terdapat hambatan dari dalam yakni sebagai berikut:

- **Masih terbatasnya kompetensi dan kuantitas sumber daya manusia**

Sumber daya manusia yang dimiliki dalam bidang rehabilitasi sosial masih tergolong sangat terbatas dan belum tercukupi. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial mengakui bahwa sumber daya manusia yang berkompetensi dalam memberikan penanganan kepada para penerima manfaat masih terbatas.

- **Terbatasnya alokasi anggaran**

Terdapat kekurangan dalam pengalokasian anggaran terhadap kegiatan – kegiatan program Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam. Berdasarkan hasil wawancara penulis terhadap Kepala UPTD P2PMKS Nilam Suri mengatakan bahwa anggaran yang tersedia untuk melaksanakan pemberdayaan kepada para penerima manfaat masih tergolong kurang maksimal sehingga banyak kegiatan-kegiatan tambahan untuk menunjang keberdayaan yang tidak dapat dilaksanakan karena kurangnya anggaran.

2. Faktor Eksternal

Beberapa faktor hambatan selain dari dalam Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam terdapat juga hambatan dari luar yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan program tersebut yakni sebagai berikut:

- **Kurangnya dukungan dari keluarga dan masyarakat**

Rendahnya dukungan keluarga dan masyarakat terhadap Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam untuk melakukan pemberdayaan terhadap anggotanya yang termasuk dalam penerima manfaat, yang mana banyak dari keluarga ataupun yang masyarakat yang mengaku anggota keluarga penerima manfaat memilih untuk menjemput anggota keluarganya dan tidak membiarkan anggotanya yang sebagai Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial untuk diberdayakan oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam.

- **Rendahnya kesadaran diri para Penyandang Kesejahteraan Sosial**

Kesadaran diri para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang tergolong dalam penerima manfaat masih rendah, yang mana berdasarkan hasil wawancara penulis terhadap Kepala UPTD P2PMKS Nilam Suri mengatakan bahwa para penerima manfaat beberapa ada yang memilih untuk kabur dan kembali ke jalanan daripada mengikuti pelaksanaan program. Sehingga hal ini mempengaruhi proses keberhasilan pelaksanaan pemberdayaan melalui program rehabilitasi sosial yang dilakukan oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam.

3.3. Faktor Pendukung dalam Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial melalui Program Rehabilitasi Sosial

Tidak hanya terdapat faktor penghambat saja namun juga terdapat beberapa faktor yang mendukung keberhasilan pelaksanaan pemberdayaan melalui program rehabilitasi sosial ini sehingga pelaksanaan pemberdayaan dapat berjalan dengan baik. Berikut beberapa hal yang menjadi pendukung dalam pelaksanaan program:

- 1. Dukungan pihak ketiga terhadap sumber daya manusia Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat**

Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam dengan adanya bantuan dari pihak luar dengan membentuk suatu tim yang disebut sebagai Tim Reaksi Cepat (TRC) yang mempunyai tugas khusus untuk melakukan penjangkauan kepada masyarakat Kota Batam yang termasuk dalam Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial untuk di data dan dibawa ke UPTD P2PMKS Nilam Suri. Kerjasama dengan pihak ketiga sebagai tenaga ahli tambahan untuk memberikan pelatihan-pelatihan yang bermanfaat juga turut menjadi faktor pendukung dalam keberhasilan pelaksanaan program.

- 2. Adanya dukungan dari pemerintah daerah terkait pemberdayaan masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial**

Pemerintah Kota Batam mempunyai komitmen dalam melakukan pembangunan di Kota Batam tidak hanya fisik tetapi juga dengan non fisik yakni Pemerintah Kota Batam mendorong keterlibatan perusahaan di Kota Batam melalui Program CSR (*Corporate Social Responsibility*) untuk mendukung kegiatan operasional maupun pengembangan program yang ada di UPTD P2PMKS Nilam Suri. Hal ini dimaksudkan sebagai pembangunan non fisik yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Batam sebagai bentuk dukungan pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat melalui Program Rehabilitasi Sosial khususnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kota Batam.

- 3. Pendampingan program yang efektif**

Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam terus memberikan pelayanan-pelayanan sosial yang bermanfaat bagi masyarakat Kota Batam khususnya para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dengan mengadakan sosialisasi terhadap keluarga rentan di beberapa kelurahan dan kecamatan di Kota Batam terkait dengan pemberdayaan melalui Program Rehabilitasi Sosial. Selain itu, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam juga terus memberikan pendampingan pasca rehabilitasi dengan tujuan agar penerima manfaat program yakni Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial mendapatkan kepercayaan diri lebih terhadap keberhasilan program yang mereka jalani sehingga terdapat kepercayaan diri dalam kehidupan bermasyarakat bagi para penerima manfaat.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Dalam pelaksanaan penelitian yang berjudul pemberdayaan masyarakat melalui program rehabilitasi sosial telah banyak dilakukan sebelumnya dengan beragam fokus penelitian. Penelitian ini hadir untuk memberikan analisis spesifik mengenai pelaksanaan pemberdayaan melalui program rehabilitasi sosial tersebut yang ditujukan untuk mengembalikan fungsi sosial penerima manfaat.

Sama halnya dengan penelitian sebelumnya bahwa pemberdayaan dilakukan dengan tujuan agar memenuhi aspek ekonomi yaitu kebebasan, kemampuan membeli kebutuhan, dan memiliki jaminan ekonomi dalam kehidupannya (Fauziyyah Syam, 2021). Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan

oleh Eltiga Angga Putra Sihombing, Dwi Yuliani, dan Windriyanti hasil dari penelitian tersebut menunjukkan program rehabilitasi sosial mempunyai berbagai hambatan baik dari dalam maupun dari luar program itu sendiri (Eltiga Angga Putra Sihombing et al., 2020). Adapun penelitian dari Tazkiya Rizky Wildana, Dyah Lituhayu, Endang Larasati Setianingsih juga menunjukkan bahwa dari penelitian yang dilakukan ditemukan bahwa program rehabilitasi sosial ini lebih berfokus terhadap hasil daripada dampak kedepannya terhadap para penerima manfaat pasca rehabilitasi (Tazkia Rizky Widiana et al., 2023). Adapun penelitian yang dilakukan Riza Korin Alfarabbi & Kus Indarto juga menunjukkan hal yang sama yakni program rehabilitasi sosial belum terlaksana dengan maksimal karena kurangnya keterbukaan keluarga dalam pelaksanaan program (Korin Alfarabbi & Indarto, 2024). Sesuai dengan Penelitian (Ningsih, 2022) juga menunjukkan program rehabilitasi sosial sudah sesuai dengan Pasal 17 PERMENSOS RI No 16 Tahun 2019 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial.

Namun, penelitian ini mempunyai perbedaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya yakni berbeda dengan penelitian (Fauziyyah Syam, 2021) yang berfokus pada pemberdayaan ekonomi Penyandang Disabilitas Tunarungu melalui penyaluran tenaga kerja. Adapun penelitian (Korin Alfarabbi & Indarto, 2024) yang berfokus pada implememntasi program rehabilitasi sosial serta lokasi penelitian yang dilakukan juga memiliki perbedaan. Penelitian ini berfokus pada pelaksanaan pemberdayaan dengan lokasi penelitian dilaksanakan di Kota Batam.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Rehabilitasi Sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam telah dilakukan dengan cukup baik, sesuai dengan teori pemberdayaan masyarakat Sumodiningrat. Pemberdayaan telah dilakukan dengan adanya penciptaan kondisi yang memungkinkan bagi para penerima manfaat dan pemberian pembinaan dan pelatihan-pelatihan keterampilan sebagai suatu upaya dalam meningkatkan kompetensi diri para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial. Namun terdapat kekurangan pada perlindungan jaminan keberhasilan dalam pemenuhan perekonomian pasca rehabilitasi bagi para penerima manfaat.

Dalam pelaksanaannya, pelaksanaan pemberdayaan melalui program rehabilitasi sosial terdapat beberapa hal yang menjadi hambatan, yaitu terbatasnya kompetensi dan kuantitas sumber daya, alokasi anggaran yang terbatas, kurangnya dukungan keluarga dan masyarakat, dan kesadaran diri untuk berubah yang rendah. Adapun beberapa hal yang menjadi pendukung keberhasilan pelaksanaan pemberdayaan melalui program ini yakni, dukungan pihak ketiga dalam ketersediaan sumber daya manusia, dukungan pihak ketiga dalam pelaksanaan pemberdayaan melalui program rehabilitasi sosial, dan pendampingan program yang efektif. Kedepannya diharapkan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat khususnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) melalui Program Rehabilitasi Sosial dapat terlaksana dengan lebih baik sehingga mampu memberikan kemandirian sepenuhnya kepada para PMKS.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan program rehabilitasi sosial khususnya dalam memberdayakan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kota Batam untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Pemerintah Kota Batam, khususnya Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam beserta seluruh jajarannya yang telah memberikan kesempatan serta dukungan kepada penulis untuk melaksanakan penelitian, serta kepada seluruh pihak yang telah membantu dan mendukung kelancaran pelaksanaan penelitian ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Ayunda, R., Disemadi, H. S., & Wijaya, R. (n.d.). *Kebijakan Kawasan Bebas Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Batam: Suatu Kajian Hukum Perspektif SDGs*.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Dr. Drs. Ismail Nurdin, M. S., & Dra. Sri Hartati, M. S. (2023). Metodologi Penelitian Sosial Dasar. In *Metodologi Penelitian Sosial Dasar*. <https://doi.org/10.11594/ubpress9786232967496>
- Eltiga Angga Putra Sihombing, Dwi Yuliani, M. S. Ph. D., & Dra. Windriyanti, M. (2020). *Pelaksanaan Program Rehabilitasi Sosial Bagi Gelandangan Dan Pengemis Di Balai Rehabilitasi Sosial Gelandangan Dan Pengemis Di Pulau Jawa. Jurnal Ilmiah Rehabilitasi Sosial*, 2.
- Fauziyyah Syam, S. (2021). *Pemberdayaan Ekonomi Melalui Penyaluran Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas Tunarungu di Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Sensorik Rungu Wicara (Balai Melati) Jakarta Timur. Skripsi*.
- Fernandes, S. (2017). *Metodologi Penelitian Pemerintahan*. Alfabeta.
- Korin Alfarabbi, R., & Indarto, K. (2024). *Implementation Of a Social Rehabilitation Program In The Empowerment Of Persons With Disabilities By The Department Of Social And Community Empowerment Of The City Of Samarinda*. 4(September), <https://doi.org/10.30656/jika.v4i2.9394>
- Mega Prastiwi, A., & Ulfatun Najicha, F. (2022). Agustin Mega Prastiwi, dkk. : Peran Dinas Sosial dalam Penertiban... Peran Dinas Sosial dalam Penertiban Gelandangan dan Pengemis di Kota Surakarta. *Jurnal Discretie*, 3(2).
- M.Rafli Muhajir, fajar U. R. (2023). Upaya Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis Melalui Program Rehabilitasi Sosial Di Dinas Sosial Kota Medan. *Pengabdian Pada Masyarakat*, 3. <https://doi.org/10.58466/literasi.v3i1.1264>
- Ningrum, E. P., Nursyamsi, S. E., Siregar, N., Bhayangkara, U., & Raya, J. (2024). *Faktor Terkait Kesenjangan Ekonomi dan Kesejahteraan*. 7(September), 116–126.
- Ningsih, S. (2022). *Skripsi Oleh : SULISTIA NINGSIH NIM . 11870520311 Jurusan Ilmu Administrasi Negara*.

- Putri, A., Asto, D., & An, A. (2024). *Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Netra dan Fisik Melalui Program Rehabilitasi Sosial di Panti Fajar Harapan*. 2(2), 1–15. <https://doi.org/10.20527/multikultural.v2i2.398>
- Rahayu, H. C. (2023). *Jurnal Informatika Ekonomi Bisnis Analisis Kesejahteraan Masyarakat terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia*. 5, 77–85. <https://doi.org/10.37034/infeb.v5i1.198>
- Rasyid, M., & Dompok, T. (2022). *Efektivitas Program Rehabilitasi Sosial Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Batam*.
- Samad, E. C., & Tantimin, T. (2022). Efektivitas Pemerintah dalam Mencegah Serta Mengurangi Anak Jalanan di Kota Batam. *Wajah Hukum*, 6(2), 241. <https://doi.org/10.33087/wjh.v6i2.910>
- Saputra, R. (n.d.). *Efektivitas Pelaksanaan Program Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi di Kelurahan Tanjunggading Kecamatan Tanjungkarang Timur Kota Bandarlampung Provinsi Lampung)*.
- Srinivasan, I., & Binu Sahayam, D. (2024). “Homeless Life to Hopeful Life of Elderly Beggars”-: Before and After Rehabilitation: A Qualitative Approach. *Gerontology and Geriatric Medicine*, 10. <https://doi.org/10.1177/23337214231222738>
- Suaib. (2023). Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat. In *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*. [http://repo.iain-tulungagung.ac.id/5510/5/BAB 2.pdf](http://repo.iain-tulungagung.ac.id/5510/5/BAB%202.pdf)
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Sumantri, I., Fikri, F., Lubis, M. A., Program, E., Sosial, R., Gelandangan, T., Pengemis, D., Rehabilitasi, D. B., Bina, S., Cisarua, K., Balai, D., Karya Cisarua, B., Sumantri, I. I., & Pikri, F. (2018). *Efektivitas Program Rehabilitasi Sosial Terhadap Gelandangan Dan Pengemis Di Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya Cisarua* (Vol. 10, Issue 1).
- Sumodiningrat, Gunawan. 1998. *Membangun Perekonomian Rakyat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Tazkia Rizky Widiana, Dyah Lituhayu, & Endang Larasati Setianingsih. (n.d.). *Evaluasi Program Rehabilitasi Sosial Dalam Penanganan Gelandangan Dan Pengemis Di Provinsi Jawa Tengah*.
- Trani, J. F., Pitzer, K. A., Vasquez Escallon, J., & Bakhshi, P. (2022). Access to Services from Persons with Disabilities in Afghanistan: Is Community Based Rehabilitation Making a Difference? *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 19(10). <https://doi.org/10.3390/ijerph19106341>
- Weiner, B., Osborne, D., & Rudolph, U. (2011). An attributional analysis of reactions to poverty: The political ideology of the giver and the perceived morality of the receiver. *Personality and Social Psychology Review*, 15(2), 199–213. <https://doi.org/10.1177/1088868310387615>